

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi masalah umum bagi semua negara termasuk Indonesia yang semakin berjalannya waktu semakin mengkhawatirkan apalagi negara dengan jumlah penduduk padat seperti Indonesia. Kemiskinan yang terjadi disuatu negara menjadi tolak ukur untuk melihat baik buruknya perekonomian suatu negara. Kemiskinan bukanlah hanya menjadi masalah pribadi dan pemerintah saja, tetapi juga menjadi masalah kita bersama yang harus ditekan jumlahnya. Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia (MKRI, 1945). Sedangkan, dalam Islam Allah SWT berfirman pada Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut:

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (الذُّرِّيَّت/51: 19)

Berarti, Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (Az-Zariyat/51:19). Islam sebagai agama yang banyak dianut di Indonesia memiliki andil yang besar terhadap pemberantasan kemiskinan, oleh karena itu sudah seharusnya program-program pembangunan yang dilaksanakan juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program

pemerintah dalam rangka menekan angka kemiskinan salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM).

Program Bantuan Langsung Tunai pertama kali diprakarsai oleh Luiz Inacio da Silva, yaitu presiden Brazil ke 35 pada tahun 1990 an dengan nama *Bolsa Escola* kemudian berganti nama menjadi *Bolsa Familia*. *Bolsa Familia* masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brazil hingga tahun 2011 (World Bank, 2007). sehingga program ini di adopsi oleh negara-negara lainnya. Kebijakan pengurangan subsidi menjadi tren global, ditandai dengan banyaknya negara yang mulai mengurangi subsidi dan menggantikannya dengan bantuan yang lebih ditargetkan bagi rumah tangga miskin. Sebanyak 40 negara telah melakukan reformasi subsidi energi sejak tahun 2014. Subsidi pangan serta konsumsi energi memang telah menjadi salah satu bentuk bantuan sosial yang umum dilakukan di negara dengan pendapatan rendah dan menengah selama beberapa dekade. Bantuan ini disebut “*targeted transfers*” belakangan ini mulai meningkat secara pesat dinegara berkembang.

Di Indonesia program ini pertama kali dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Program ini berupa kucuran bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahunnya untuk mengurangi dampak dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada rumah tangga miskin (World Bank, 2007). Melalui intruksi presiden nomor 12, digalakkan program bantuan langsung tunai tidak bersyarat pada oktober tahun 2005 hingga desember

2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Angka kemiskinan di Indonesia disajikan pada tabel berikut:

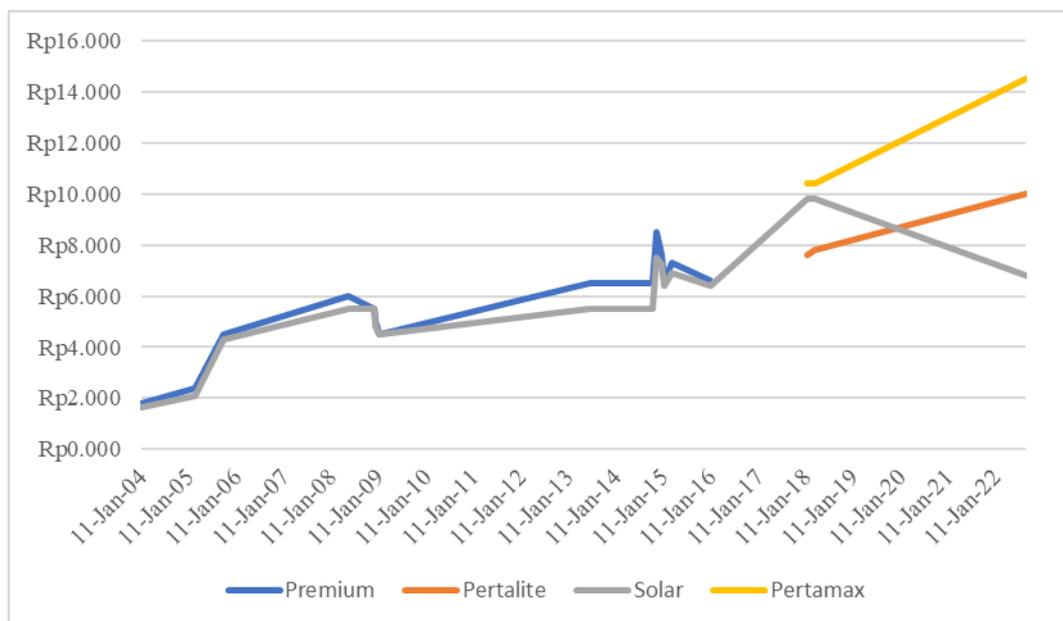
**Tabel 1.1**  
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Wilayah 2005-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)		
	Kota	Desa	Kota + Desa
2005	12.40	22.70	35.10
2006	14.49	24.81	39.30
2007	13.56	23.61	37.17
2008	12.77	22.19	34.96
2009	11.91	20.62	32.53
2010	11.10	19.93	31.02
Maret 2011	11.05	18.97	30.02
September 2011	10.95	18.94	29.89
Maret 2012	10.65	18.49	29.13
September 2012	10.51	18.09	28.59
Maret 2013	10.33	17.74	28.07
September 2013	10.63	17.92	28.55
Maret 2014	10.51	17.77	28.28
September 2014	10.36	17.37	27.73
Maret 2015	10.65	17.94	28.59
September 2015	10.62	17.89	28.51
Maret 2016	10.34	17.67	28.01
September 2016	10.49	17.28	27.76
Maret 2017	10.67	17.10	27.77
September 2017	10.27	16.31	26.58
Maret 2018	10.14	15.81	25.95
September 2018	10.13	15.54	25.67
Maret 2019	9.99	15.15	25.14
September 2019	9.86	14.93	24.79
Maret 2020	11.16	15.26	26.42
September 2020	12.04	15.51	27.55
Maret 2021	12.18	15.37	27.54
September 2021	11.86	14.64	26.50
Maret 2022	11.82	14.34	26.16
September 2022	11.98	14.38	26.36

Sumber : Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tahun 2005-2022, Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, jumlah orang miskin di Indonesia per September 2022 sebesar 26.36 juta orang atau sebesar 9.57 persen dari total penduduk. Jumlah itu naik dibandingkan maret 2022. Tapi jika dibandingkan September 2021, angka tersebut menurun 140 ribu atau 0.14 persen. Persentase kemiskinan lebih besar di desa daripada di kota, yaitu sebesar 12.36 persen penduduk miskin di desa dan 7.53 persen penduduk miskin di kota. Kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan harian jadi pemicu naiknya angka kemiskinan.

Sementara perkembangan harga BBM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Sumber : Keputusan Menteri ESDM tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tahun 2004-2022, diolah.

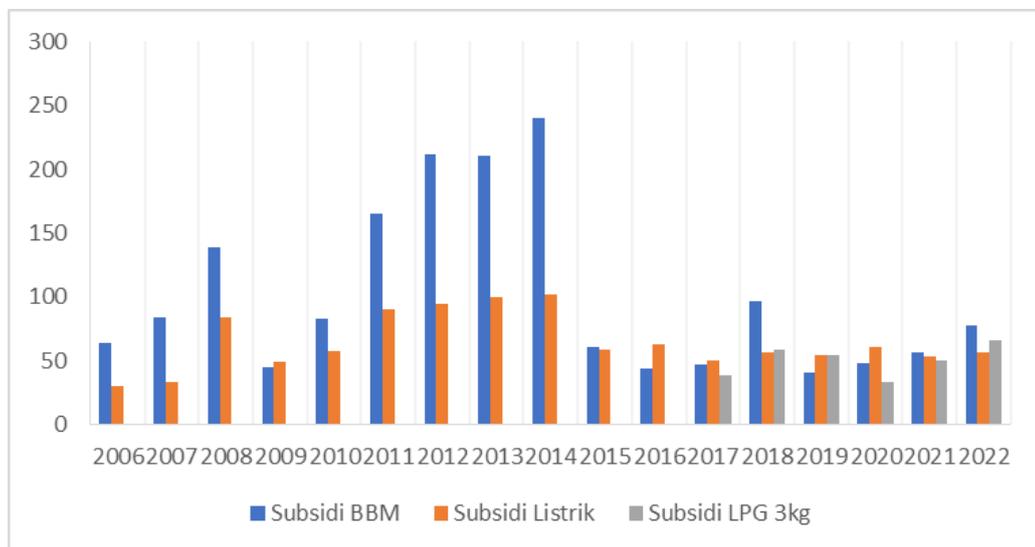
**Gambar 1.1**  
Perkembangan Harga BBM Tahun 2004 - 2022

Secara historis pemberian BLT/Kompensasi BBM di Indonesia selalu dilatarbelakangi oleh kenaikan harga BBM yang dipengaruhi oleh perubahan harga minyak internasional yang berfluktuasi. Penetapan kebijakan BLT/ Kompensasi BBM pertama kali melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, yaitu melakukan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan kenaikan BBM rata-rata 29 persen per-1 Maret 2005. Dan kemudian diikuti oleh kebijakan pengurangan subsidi BBM secara drastis pada 1 oktober 2005 melalui peraturan presiden No. 55 Tahun 2005. Keputusan untuk mengurangi subsidi BBM yang dengan kata lain menaikkan harga BBM terpaksa dilakukan karena peningkatan konsumsi BBM seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan ditambah dengan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi sejak akhir 2004 menjadikan beban anggaran negara untuk pemberian subsidi BBM meningkat. Berdasar data RAPBN 2005, pada awalnya anggaran untuk subsidi harga BBM dipatok sebesar Rp19,00 triliun dari total anggaran Rp 266.22 triliun. Namun dikarenakan situasi yang berubah pada anggaran APBN-P, angka subsidi tersebut membengkak lebih dari 109 persen menjadi Rp39.796 triliun (DEPKEU, 2005). Pembekakan tersebut akan menjadi lebih besar lagi seandainya kebijakan subsidi tidak dikurangi pada tahun 2005. Pemerintah mengasumsikan jika subsidi BBM tidak dikurangi, maka anggaran yang diperlukan untuk subsidi pada tahun 2005 akan memerlukan Rp60.135 triliun. Kebijakan pemotongan subsidi juga terjadi pada tahun 2008 dengan kenaikan

sebesar 50 persen dari harga awal, terjadi karena harga minyak dunia kembali meningkat. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah kemudian kembali memberikan BLT kepada masyarakat pada tahun 2009 hingga tahun 2013 dan kemudian sempat berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kenaikan harga minyak dunia kembali terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh konflik Russia dan Ukraina. Karena hal tersebut harga BBM kembali melonjak tinggi hingga kemudian pemerintah terpaksa mengalihkan subsidi BBM pada September 2022 dan melaksanakan Kembali program BLT yaitu pemberian uang tunai atas kompensasi BBM yaitu bantuan langsung tunai BBM. Program BLT tersebut diselenggarakan sebagai respon dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Kebijakan pemotongan subsidi tersebut merupakan bagian dari strategi besar (*grand strategy*) untuk mengalihkan subsidi BBM dari subsidi komoditas menuju subsidi langsung.

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau kompensasi BBM di Indonesia tumbuh sangat pesat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,1 persen pertahun selama 2006-2022, sangat mendekati dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan APBN pertahun sebesar 12,1 persen pada periode yang sama. Dalam besarnya, subsidi BBM tumbuh dari Rp107,4 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp502,4 triliun pada tahun 2022, sementara APBN tumbuh dari Rp 440 triliun menjadi Rp 2.750 triliun pada periode yang sama. Apabila dibandingkan persinya,

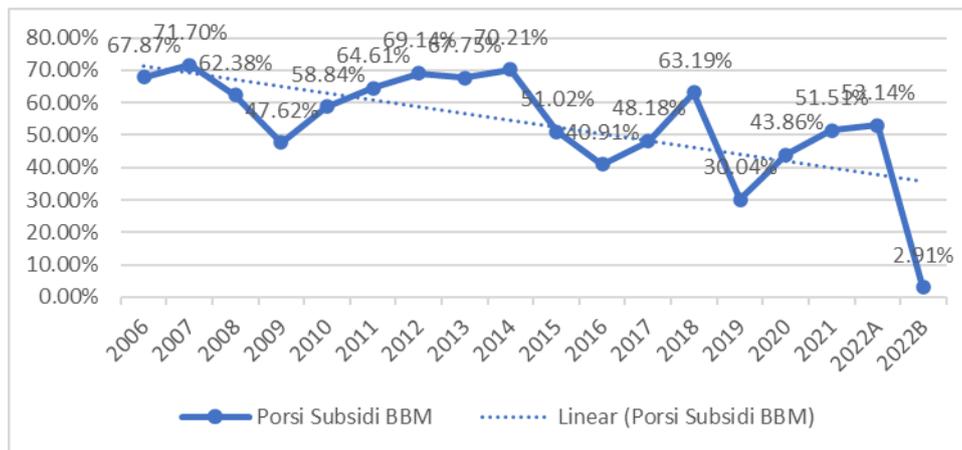
maka besaran subsidi mengambil peran yang besar terhadap APBN. Melihat porsi tersebut, dapat dipahami beban berat anggaran pemerintah untuk menanggung subsidi. Sebagian besar subsidi diperuntukan bagi subsidi energi (migas dan listrik), profil subsidi energi tersebut dapat diperinci lebih jauh menurut subsidi BBM dan subsidi listrik dan subsidi LPG 3kg. Selama 2006-2022, subsidi BBM tercatat seringkali lebih tinggi dibandingkan subsidi listrik kecuali pada tahun 2009, 2016, 2017, 2019, dan 2020 sebagaimana disajikan dalam gambar 1.2 berikut:



Sumber : Portal Data APBN Kemenkeu RI Tahun 2006-2022, diolah.

**Gambar 1.2**  
Profil Anggaran Subsidi Energi Periode 2006-2022

Profil subsidi tersebut menunjukkan bahwa subsidi BBM berkisar antara 30.04 persen (2019) hingga 71.70 persen pada tahun 2007, Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.3 berikut:



Sumber : Portal Data APBN Kemenkeu RI Tahun 2006-2022, diolah.

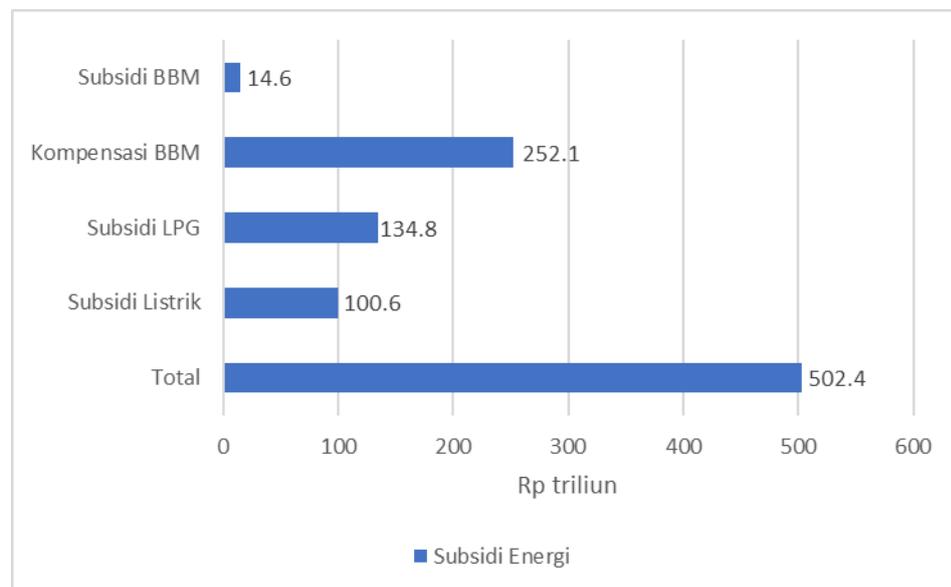
**Gambar 1.3**

Profil Subsidi BBM dibandingkan Subsidi Energi Periode 2006-2022

Profil belanja tersebut tidak banyak berbeda pada periode 2014, namun mulai berubah dan mengalami tren (garis linear) penurunan ditahun berikutnya seiring berubahnya kebijakan subsidi pada pemerintahan yang baru yaitu terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia sejak Oktober 2014. Dengan kebijakan pemerintahan yang baru untuk alokasi anggaran program pemerintahan terpilih yaitu program perlindungan sosial seperti, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, Kartu Sembako hingga bantuan sosial berupa uang tunai, subsidi upah dan penanggulangan bencana COVID-19. Sehingga terjadi perubahan pada postur APBN. Terjadinya trend penurunan pada porsi subsidi BBM disebabkan karena komposisi anggaran subsidi energi mengalami penyesuaian dari yang sebelumnya hanya terdiri dari dua

jenis subsidi yaitu subsidi BBM dan listrik, sejak 2017 menjadi 3 jenis yaitu subsidi dan kompensasi BBM, Subsidi LPG, Subsidi Listrik. (lihat Gambar 1.4). Pada tahun 2022A awalnya anggaran subsidi energi sebesar 152.5 triliun. Namun, karena naiknya harga minyak dunia hingga di atas US\$100 per barel serta meningkatnya konsumsi bbm bersubsidi, pemerintah menaikkan anggaran subsidi energi 3 kali lipat menjadi Rp502 triliun.

Dengan adanya penyesuaian ini, anggaran subsidi dan kompensasi BBM semakin membengkak hingga 3 kali lipat pada 2022 yaitu sebesar yaitu dari rencana awal sebesar Rp152.5 triliun menjadi Rp502.4 triliun dengan rincian sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.4 berikut:



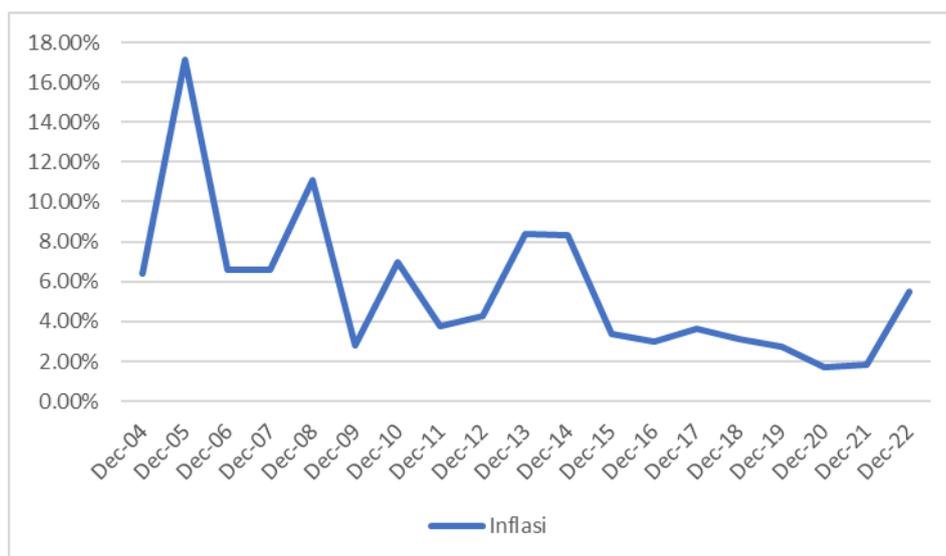
Sumber : Pernyataan Dirut Pertamina dalam Rapat bersama Komisi VI DPR RI pada September 2022 melalui kanal Youtube Resmi DPR RI, diolah.

**Gambar 1.4**  
Rincian Anggaran Subsidi Energi dan Kompensasi BBM 2022

Anggaran Rp267 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM tersebut, sebesar Rp252.1 triliun dialihkan untuk kompensasi kenaikan harga bbm yaitu pemberian bantuan langsung tunai (BLT BBM) kepada masyarakat miskin dan sisanya sebesar 14.6 triliun dianggarkan untuk subsidi BBM. Kebijakan pemerintah ini terjadi karena jika dibiarkan ditengah harga minyak dunia yang tinggi maka belanja subsidi akan terus membengkak dan diperkirakan bisa mencapai Rp698 triliun jika harga BBM tidak dinaikkan. Selain itu, jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN, selain cenderung meningkat, juga cukup besar jika dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain. Besarnya porsi belanja untuk subsidi tersebut, khususnya subsidi BBM merupakan beban yang cukup berat yang harus ditanggung oleh pemerintah dan berimplikasi pada berkurangnya anggaran untuk belanja modal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Subsidi BBM dinilai 70 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tergolong mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi sehingga subsidi yang diberikan dirasa kurang tepat yang mana semestinya dinikmati oleh kelompok masyarakat ekonomi bawah atau kurang mampu (Priyanto, D. 2022).

Pada September 2022 dampak dari pemotongan subsidi BBM tersebut menyebabkan harga BBM melonjak tinggi dari Rp7.650 ke Rp10.000 untuk jenis BBM Pertalite, Solar dan Pertamax. Pemotongan subsidi ini dialihkan ke subsidi langsung dengan memberi kompensasi tunai berupa BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp150.000 per bulan, diberikan sebanyak empat bulan. Pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM mempunyai tujuan agar membantu meringankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin

dari tekanan gejolak kenaikan harga global sehingga angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diupayakan menurun. Walaupun tujuan kebijakan penarikan subsidi BBM sangat positif, namun kenaikan harga BBM tentu akan mengundang reaksi kontra dari masyarakat. Alasannya adalah dampak inflatoir yang menurunkan daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Secara psikologis, masyarakat beranggapan kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga barang secara luas (inflasi). Gambar 1.5 berikut menunjukkan tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2022.



Sumber : Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (Desember tahun n terhadap desember tahun n-1), Berita Resmi Statistik Tahun 2004-2022 BPS, diolah.

### Gambar 1.5

Tingkat Inflasi di Indonesia Year on Year (Persen) Tahun 2004-2022

Pemerintah menyadari bahwa pengurangan subsidi yang berakibat dengan naiknya harga BBM dan diikuti oleh Inflasi, akan menambah beban ekonomi masyarakat terutama yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Adanya subsidi BBM dalam kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia memang penuh

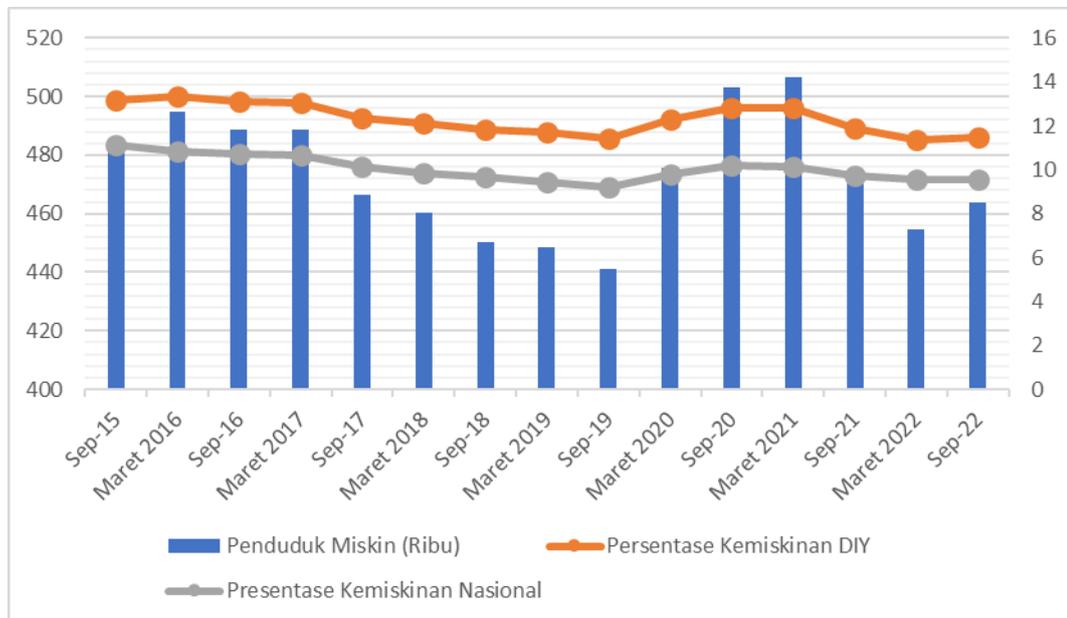
dengan dilema. Di satu sisi subsidi sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat Indonesia dengan ekonomi menengah kebawah masih mempunyai daya beli yang rendah terhadap BBM, jika subsidi dicabut maka banyak masyarakat tidak mampu menjangkau harga minyak yang tinggi dan imbasnya akan dirasakan pula dalam berbagai sektor ekonomi lainnya. Biaya transportasi pasti akan naik, begitu pula berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat.

Bisa dikatakan dampak pemotongan subsidi akan menimbulkan multiple efek yang bersifat berantai, akan berimbas pada semua aspek kehidupan masyarakat dan semua sector perekonomian. Untuk meredam dampak dari kenaikan harga BBM, pemerintah secara bersamaan membuat kebijakan kompensasi atas kenaikan harga BBM yang diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global sehingga angka kemiskinan dapat diupayakan menurun (Bahri, 2022).

### **Profil Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Secara umum, pada periode September 2015 - September 2022, tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kecenderungan yang menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi peningkatan kemiskinan. Pada Maret 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan oleh wabah Covid-19. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022 terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan. Namun pada September 2022 kemiskinan kembali mengalami kenaikan bertepatan saat subsidi BBM di alihkan oleh pemerintah yang

menyebabkan naiknya harga BBM. Berikut perkembangan tingkat kemiskinan September 2015 sampai dengan September 2022 disajikan pada gambar 1.6 berikut:



Sumber : Profil Kemiskinan D.I Yogyakarta September 2022, Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik 2022.

### Gambar 1.6

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin D.I Yogyakarta dibandingkan Persentase Kemiskinan Nasional periode September 2015-September 2022

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar diatas, jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta pada September 2015 mencapai 485.65 ribu orang. Sampai dengan September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 44,6 ribu orang. Namun dengan adanya wabah Covid-19, jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475.72 ribu orang pada maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sampai dengan maret 2021. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506.45 ribu orang.

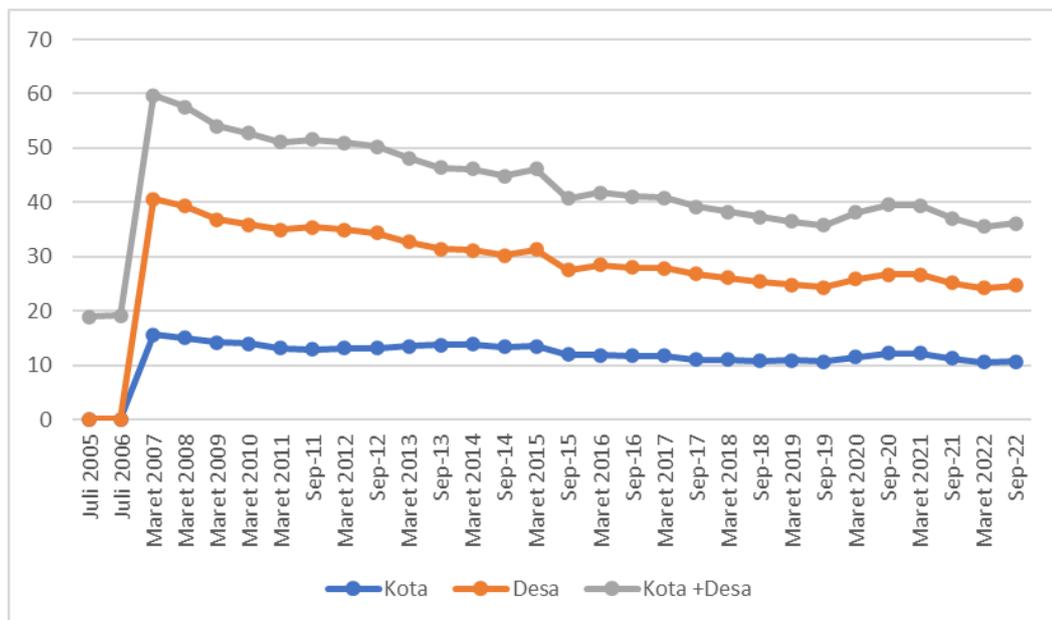
Pada September 2022, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan jika dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 adalah

sebanyak 463.63 ribu orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 8.9 ribu orang. Ini berdekatan setelah pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke Kompensasi pemberian BLT BBM.

Sedangkan D.I Yogyakarta memiliki persentase angka kemiskinan yang tinggi. Persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11.49 persen dengan jumlah 463.63 orang pada September 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata persentase kemiskinan nasional yang berada diangka 9.57 persen pada September 2022. Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2022 sebesar 11.49 persen tersebut, menurun sebesar 0.42 persen dibandingkan September 2021, namun naik menjadi 0.15 persen dibandingkan Maret 2022. Pada tiga bulan terakhir naik dari 11.34 persen ke 11.49 persen sehingga DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.

Persentase penduduk miskin jika dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan, maka daerah perkotaan lebih berdampak atas kenaikan harga BBM dibandingkan perdesaan, hal ini berdasarkan penelitian Akhmad (Akhmad, 2014) yang berjudul Dampak Kompensasi Kenaikan Harga BBM terhadap Kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut wajar karena mobilitas penduduk perkotaan lebih tinggi dibanding masyarakat perdesaan sehingga masyarakat perkotaan lebih banyak mengonsumsi BBM dibanding masyarakat perdesaan. Selain itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin secara absolut di D.I Yogyakarta paling banyak terdapat di daerah perkotaan dan jumlahnya lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan. Di perkotaan tercatat sebanyak 321.07 ribu orang. Sedangkan di perdesaan sebanyak 142.57 ribu orang.

Maka dari itu penulis memilih perkotaan yakni Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian. Walaupun secara persentase, penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, seperti yang ditunjukkan gambar 1.7 berikut:

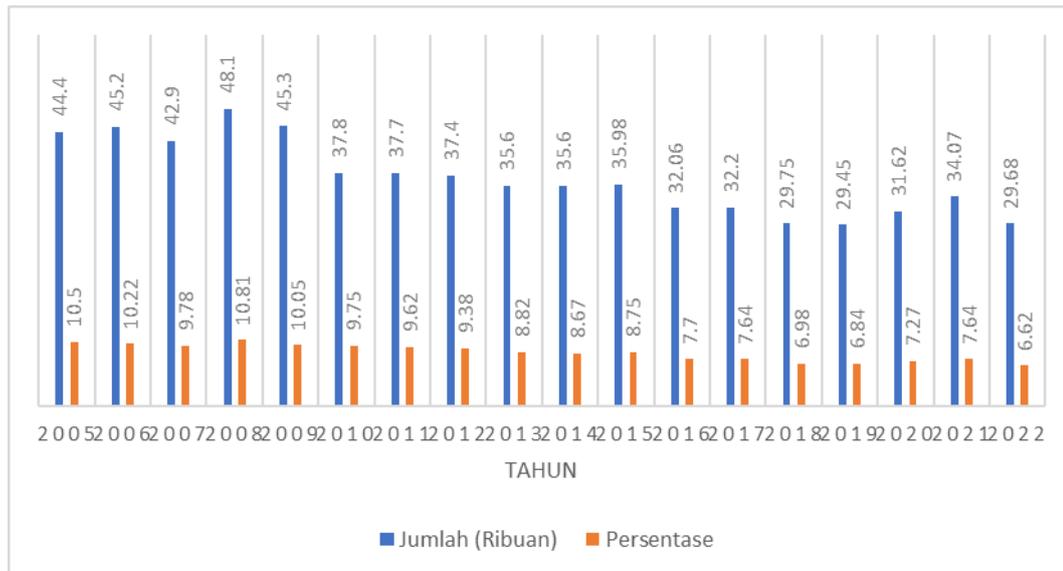


Sumber : Profil Kemiskinan D.I Yogyakarta, Berita Resmi Statistik 2005-2022.

**Gambar 1.7**  
Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Yogyakarta 2005-2022

Pada Gambar 1.7 diatas, menunjukkan bahwa selama periode Juli 2005 - September 2022 tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Dan pada periode yang sama, kebijakan kompensasi BBM berupa pemberian BLT mulai diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 2005 (Izzati *et al.*, 2020). Penulis menduga adanya pengaruh kebijakan BLT BBM terhadap peningkatan standar hidup yang terjadi selama periode tersebut.

Fokus penelitian ini, yaitu meneliti isu program BLT BBM sebagai upaya untuk menahan parahnya angka kemiskinan di perkotaan khususnya di Kota Yogyakarta tahun 2022 sebagai objek penelitian. Berikut data jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Yogyakarta Tahun 2005-2022, diolah.

### Gambar 1.8

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta 2005-2022

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) apakah kebijakan kompensasi BBM berupa bantuan langsung tunai mampu mengatasi masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta sebagai akibat dari kenaikan harga BBM tahun 2022 serta apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga perkotaan di Kota Yogyakarta. (2) Mencari gambaran yang lebih jelas apakah bantuan berdampak pada peningkatan terhadap akses pangan dan non-pangan serta persepsi terhadap pendidikan rumah tangga penerima manfaat di

perkotaan; (3) serta melihat apakah BLT BBM yang tujuan untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, mampu menekan angka kemiskinan/meningkatkan standar hidup dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga benar-benar dapat menjadi solusi yang tepat dan efektif dalam meredam dampak dari kenaikan harga BBM.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada analisis kebijakan BLT BBM terhadap peningkatan standar hidup dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat BLT BBM di Kota Yogyakarta yakni pada penelitian ini hanya membahas Bantuan Langsung Tunai atas kompensasi dari kenaikan harga BBM, tidak membahas kebijakan BLT lainnya, seperti: Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial lainnya serta hanya berfokus pada daerah perkotaan yakni Kota Yogyakarta.

Jenis Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) terdiri dari 2 jenis yakni BLT BBM yang bersumber dari APBN diberikan oleh Pemerintah Pusat dan BLT BBM diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial menggunakan APBD yang juga bersumber dari 2 persen Dana Transfer Umum (dana alokasi umum dan dana bagi hasil) yang berasal dari APBN.

Penelitian ini tidak membedakan BLT BBM yang bersumber dari APBN dan APBD karena tujuan diberikannya sama yaitu untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM. BLT BBM APBD, atas dorongan dari pemerintah pusat untuk diberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh BLT BBM APBN melalui Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun

2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun Anggaran 2022.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana dampak kepuasan penerima manfaat pada program BLT BBM terhadap peningkatan standar hidup masyarakat di perkotaan?
2. Apakah kepuasan penerima manfaat pada program BLT BBM mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat di perkotaan?
3. Apakah pemenuhan kebutuhan non-pangan berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat BLT BBM?
4. Apakah pemenuhan kebutuhan pangan berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat BLT BBM?
5. Apakah persepsi terhadap pendidikan memiliki pengaruh terhadap peningkatan standar hidup dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat BLT BBM?
6. Apakah peningkatan standar hidup dari adanya program BLT BBM mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Kompensasi Bantuan Langsung Tunai BBM kepada keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di perkotaan, bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga, pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan penerima manfaat dengan pendekatan analisis kuantitatif menggunakan metode penelitian *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM PLS) menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat umum khususnya bagi masyarakat yang menerima BLT BBM agar dapat memanfaatkan bantuan dengan baik sehingga menurunkan angka kemiskinan sesuai yang diharapkan.

2. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi mengenai Program Kompensasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai BBM di Kota Yogyakarta, serta menjadi sumber rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menetapkan strategi kebijakan guna mengembangkan berbagai alternatif kebijakan lain agar tepat sasaran terutama dalam pemberian dan penyaluran BLT BBM untuk pengentasan kemiskinan.

## **F. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Kerangka Pemikiran Penelitian adalah suatu konsep atau ide yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Berikut ini diuraikan kerangka pemikiran penelitian:

### 1. Latar Belakang

Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga global, sehingga angka kemiskinan tetap dapat diupayakan menurun. Namun masih banyak masyarakat miskin yang belum merasakan manfaat dari program ini.

### 2. Isu Penelitian

Bagaimana pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) terhadap peningkatan standar hidup dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat di Kota Yogyakarta?

### 3. Masalah Penelitian

Apakah program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) efektif dalam meningkatkan standar hidup dan

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat di Kota Yogyakarta?

#### 4. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Program BLT BBM terhadap peningkatan standar hidup dan kesejahteraan rumah tangga kepada masyarakat kota Yogyakarta yang menerima bantuan atau disebut keluarga penerima manfaat.

#### 5. Metodologi

##### a. Data yang digunakan

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### b. Metode Analisis

Menggunakan *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0.

#### 6. Judul Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil judul “Analisis Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) terhadap Peningkatan Standar Hidup dan Kesejahteraan Rumah Tangga Penerima Manfaat di Kota Yogyakarta.